

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si.

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Pembiayaan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal untuk merangsang pembangunan pedesaan pada umumnya tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) dalam konteks desentralisasi fiskal dilaksanakan. Skala kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan rasio skala dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan kota di provinsi Sumatera Utara dalam konteks divisi regional menggunakan indikator kinerja keuangan yang diukur dengan realisasi APBD pada tahun 2011 s / d pada tahun 2015. Dalam penelitian ini, dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki pencapaian suatu karya di bidang lapangan keuangan yang meliputi anggaran dan pendapatan aktual dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai alat pengukur yang berdampak pada kenaikan pendapatan. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal Scientific Abdi Scientific Studies dan Jurnal Akuntansi dan Bisnis dengan ISSN, dan mengadakan seminar mengenai hasil penelitian. Selain itu, sebagai bahan untuk sebuah buku untuk mata pelajaran pengajaran tambahan Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan dan Perpajakan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sehingga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Pramela, 2009).

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Soekarwo, 2006: 70), dalam pelaksanaan otonomi tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan kepala daerah dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Wewenang tersebut antara lain adalah adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang ditandai:

1. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dimana disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - b. Dana Perimbangan

- 5) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 6) Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 7) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 8) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Saragih, 2007).

Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum yang dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dan relevan dalam pelaksanaan pelayanan publik karena hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah yaitu sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik dalam era desentralisasi fiskal dengan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah dan memberikan fasilitas pendukung (investasi) sehingga pemerintah perlu memberikan alokasi belanja langsung yang lebih besar untuk tujuan ini.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, tetapi jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif maka kegiatan ekonomi mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP (Gross Domestic Product) dapat juga dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini menyangkut efektifitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi nasional terlihat semakin besar atau kecilnya output total dari suatu negara yang mencerminkan produktivitas nasional dengan dana investasi dalam maksimalisasi total produksi dapat mendorong tingkat laju pertumbuhan nasional. Perkembangan ekonomi daerah dalam periode jangka panjang (mengikuti pertumbuhan PDRB), membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri pengolahan dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Selama ini manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan karena anggaran daerah, khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara hati-hati sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang signifikan merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai belanja dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah kabupaten/kota dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo dkk (2006: 74) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang seiring muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Selama ini manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan karena anggaran daerah, khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara hati-hati sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi,

efisiensi dan efektifitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah dan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Diera otonomi daerah ini pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan kinerja keuangan bagi pemerintah daerah dengan melakukan optimalisasi anggaran dan mengelola sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif dalam usaha meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena utama dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar Pertumbuhan Ekonomi dan PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Total Pertumbuhan Ekonomi dan PAD di Provinsi Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun dan bersamaan dengan itu terjadi pula peningkatan belanja langsung, maka dari itu peneliti ingin melihat apakah Pertumbuhan Ekonomi dan PAD tersebut berpengaruh terhadap peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan hal ini, Wulandari (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Yogyakarta. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing berpengaruh signifikan positif terhadap belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Kabupaten di Indonesia sedangkan secara simultan DAU lebih besar berpengaruh signifikan positif dari pada PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Yogyakarta. Penelitian terdahulu memiliki keterbatasan dimana penggunaan variabel dependen penelitian hanya terbatas pada belanja pemerintah daerah dan tidak menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, oleh karena itu keterbatasan penelitian terdahulu membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dengan menggunakan variabel dependen terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang/uraian diatas peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara**".

B. Rumusan Masalah

“Apakah Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara baik secara parsial maupun simultan?”

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan tertibnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan yaitu : Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan serta Pertanggung Jawaban.

Menurut Halim (2007: 54), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Menurut Erlina (2008: 6), laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu output dari sistem akuntansi keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas

dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 156 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok:

- a. Hak daerah yang dapat dinilai.
- b. Kewajiban daerah dengan uang.
- c. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Hak daerah tersebut meliputi antara lain :

- a. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000).
- b. Hak untuk menarik retribusi/ iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000).
- c. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 Tahun 2004).
- d. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 Tahun 2004).

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan Kesejahteraan Umum.
- c. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Sejalan dengan otonomi daerah yang mulai efektif diberlakukan sejak Januari 2001 (Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah) maka perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera utara. Kinerja tersebut dapat diketahui dari tolak ukur kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah.

Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum tetapi juga menggambarkan sejauhmana tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintahan daerah (kabupaten dan kota) dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan. Skala kinerja keuangan pemerintah menggunakan skala rasio dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera utara dalam konteks pemekaran daerah menggunakan indikator-indikator kinerja keuangan yang terukur dengan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 s/d 2015 secara umum dapat dilakukan dengan :

- a. Tingkat Kemandirian Daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).
Derajat Desentralisasi Fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat.

Rumus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (t-1)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (t)}}$$

- b. Kebutuhan Fiskal.

Kebutuhan Fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Rumus Kebutuhan Fiskal Standar (KeFS) :

$$\text{Pengeluaran Daerah} / \text{Jumlah Penduduk}$$

$$\text{Kebutuhan Fiskal Standar (SKF)} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten}}{\text{Jumlah Kabupaten}}$$

c. Kapasitas Fiskal.

Kapasitas Fiskal adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil.

Rumus Kapasitas Fiskal Standar (KaFS) :

$$\text{Kapasitas Fiskal Standar (KaFS)} = \frac{\text{Jumlah PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kabupaten}}$$

d. Upaya Fiskal.

Upaya Fiskal adalah koefisien elastisitas PAD dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Rumus Elastisitas (e) :

$$\text{Elastisitas (e)} = \frac{\text{Perubahan PAD}}{\text{Perubahan PDRB}}$$

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja keuangan pemerintah daerah ini maka dibuat Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) yang pada prinsipnya adalah angka rata-rata dari ke empat indicator di atas. Untuk kabupaten (i) di tahun (t), indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{IKKPDit} = \frac{\text{DDF} + \text{KeFS} + \text{KaFS} + e}{4}$$

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk biasanya dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi, atau bahkan tidak jarang dianggap hal yang sama, menurut Hamid, Edy Suandi (2007: 43)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

- 1) Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
- 2) Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
- 3) Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
- 4) Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.
- 5) Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

b. Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan terpenting yang dialami adalah:

- 1) Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisonal dan produktivitasnya sangat rendah.
- 2) Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal (peralatan produksi) yang modern.
- 3) Tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawanan penawarannya masih jauh dibawah jumlah yang diperlukan.
- 4) Perkembangan penduduk sangatlah pesat.
- 5) Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik yang sering dihadapi.

Beberapa teori telah dikemukakan yang merangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut adalah:

- 1) Teori klasik: menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan ahli ekonomi klasik adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- 2) Teori Schumpeter: menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Teori Harrod-Domar: menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.
- 4) Teori neo klasik: melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

c. Kebijakan Pemerintah Tentang Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah:

- 1) Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi: Memodernkan kegiatan ekonomi yang ada dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru dan mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern.
- 2) Mengembangkan infrastruktur: Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon.
- 3) Meningkatkan tabungan dan investasi: Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat.
- 4) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat: Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi: Kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan tetapi melalui perencanaan pembangunan dapat mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Anonimous (2007: 15) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yakni:

- 1) Pendekatan Produksi: Pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.
- 2) Pendekatan Pendapatan: Pendekatan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan undang-undang diatas, bahwa sumber pendapatan asli daerah yang paling utama di pemerintah daerah adalah pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya, dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu pertumbuhan investasi di pemerintah daerah perlu diprioritaskan karena nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional. Pada otonomi daerah sumber pembiayaan daerah diharapkan didominasi oleh pendapatan asli daerah sementara sebelum pembiayaan otonomi daerah didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan sebagai pendapatan daerah.

Sehubungan dengan objek penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara maka komponen Pendapatan Asli Daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah.

Pajak Daerah yaitu: Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/ badan dan benda bergerak/ tidak bergerak.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yaitu: Pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu: Penerimaan dari laba atas usaha milik daerah.

d. Lain-lain PAD yang bukan pajak dan retribusi yang sah yaitu: Penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya dari dinas pertanian, dinas pekerjaan umum dan dinas perhubungan serta penerimaan lain-lain yaitu hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang beka, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa dan giro.

Kemandirian pemerintah dalam membiayai daerahnya dapat diukur dari besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pembelanjaan daerah. Kenyataannya semua daerah otonom masih menerima dana dari pusat baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan melihat kenyataan ini perlu upaya maksimal pemerintah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jika pendapatan asli daerah naik maka dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara tersebut naik (meningkat).

Menurut Halim (2008: 91), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain yang sah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Skala pendapatan asli daerah menggunakan skala rasio dan pengukuran pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan realisasi pendapatan asli daerah dan komponen PAD tahun 2011 s/d 2015. Untuk menghitung komponen PAD adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Pajak Daerah =
$$\frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$
- b. Rasio Retribusi Daerah =
$$\frac{\text{Total Retribusi Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$
- c. Rasio Laba BUMD =
$$\frac{\text{Total Laba BUMD}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$
- d. Rasio Penerimaan Lain-lain yang sah =
$$\frac{\text{Total Penerimaan Lain-lain yang sah}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori yang melandasinya, dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis tetapi juga merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Menurut Umar (2006: 27), Paradigma kuantitatif adalah pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini menggunakan desain asosiatif causal. Menurut Umar (2007: 38), Asosiatif Causal adalah menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera utara. Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, adapun alasan melaksanakan penelitian di seluruh kabupaten dan kota di provinsi Sumatera utara adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera utara. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang terukur meliputi derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal. Waktu pelaksanaan penelitian secara bertahap mulai dari bulan Maret s/d April 2017.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2008: 32), Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota provinsi Sumatera utara periode amatan tahun 2011 s/d 2015 berjumlah 33 kabupaten dan kota. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang ditentukan untuk memilih sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera utara dari tahun 2011 s/d 2015.
2. Kabupaten/kota di provinsi Sumatera utara yang tidak dimekarkan dalam kurun waktu dari tahun 2011 s/d 2015.
3. Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera utara dari tahun 2011 s/d 2015.

Tabel 3.1 Daftar Pengambilan Sampel

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Kriteria			Sampel
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	
1	Nias	√	√	√	Sampel 1

2	Mandailing Natal	√	√	√	Sampel 2
3	Tapanuli Selatan	√	√	√	Sampel 3
4	Tapanuli Tengah	√	√	√	Sampel 4
5	Tapanuli Utara	√	√	√	Sampel 5
6	Toba Samosir	√	√	√	Sampel 6
7	Labuhan Batu	√	√	√	Sampel 7
8	Asahan	√	√	√	Sampel 8
9	Simalungun	√	√	√	Sampel 9
10	Dairi	√	√	√	Sampel 10
11	Karo	√	√	√	Sampel 11
12	Deli Serdang	√	√	√	Sampel 12
13	Langkat	√	√	√	Sampel 13
14	Nias Selatan	√	√	√	Sampel 14
15	Humbang Hasundutan	√	√	√	Sampel 15
16	Pakpak Barat	√	√	√	Sampel 16
17	Samosir	√	√	√	Sampel 17
18	Serdang Bedagai	√	√	√	Sampel 18
19	Batu Bara	√	√	√	Sampel 19
20	Padang Lawas	√	√	√	Sampel 20
21	Padang Lawas Utara	√	√	√	Sampel 21
22	Labuhan Batu Selatan	√	√	√	Sampel 22
23	Labuhan Batu Utara	√	√	√	Sampel 23
24	Nias Utara	√	√	√	Sampel 24
25	Nias Barat	√	√	√	Sampel 25
26	Sibolga	√	√	√	Sampel 26
27	Tanjung Balai	√	√	√	Sampel 27
28	Pematang Siantar	√	√	√	Sampel 28
29	Tebing Tinggi	√	√	√	Sampel 29
30	Medan	√	√	√	Sampel 30
31	Binjai	√	√	√	Sampel 31
32	Padang Sidempuan	√	√	√	Sampel 32
33	Gunung Sitoli	√	√	√	Sampel 33

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka terdapat 33 kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 s/d 2015 yang memenuhi persyaratan sebagai sampel dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data sekunder secara manual berdasarkan lokasi eksternal. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif yang diperoleh dari Realisasi APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015 yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Dana Perimbangan, Realisasi PDRB, Jumlah Penduduk, Total Penerimaan Daerah serta Total Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2011 s/d 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Time Series yang memberikan informasi tentang nilai suatu variabel dari periode ke periode serta data Cross Section yaitu perbandingan 2 (dua) tahun: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 maka periode data amatan menjadi 4 (empat) tahun dan jumlah sampel 33 (polling data) sehingga sampel berjumlah 132. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Utara.

E. Defenisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk biasanya dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi, atau bahkan tidak jarang dianggap hal yang sama. Parameter Pertumbuhan Ekonomi adalah Realisasi PDRB dari tahun 2011 s/d 2015 dengan skala rasio.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Pendapatan Asli Daerah diukur dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Komponen PAD dari tahun 2011 s/d 2015 dengan menggunakan skala rasio.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2011 s/d 2015 dan skala yang digunakan adalah skala rasio.

Tabel 3.2 Defenisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Defenisi	Parameter	Skala
1	Independen : Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk biasanya dikaitkan dengan tingkat pembangunan ekonomi, atau bahkan tidak jarang dianggap hal yang sama.	Realisasi PDRB dari tahun 2011 s/d 2015	Rasio
2	Independen : Pendapatan Asli Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh PEMDA berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.	Realisasi PAD dan Komponen PAD dari tahun 2011 s/d 2015	Rasio
3	Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.	Realisasi APBD dari tahun 2011 s/d 2015	Rasio

F. Model dan Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan bantuan *Software SPSS (Statistical Package Social Science)*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang akan diteliti.

G. Perumusan Model

Untuk menentukan besarnya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Model regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 a = Konstanta
 b₁, b₂ = Koefisien Variabel
 X₁ = Pertumbuhan Ekonomi
 X₂ = Pendapatan Asli Daerah
 e = Error

H. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar memiliki data yang normal dan terbebas dari adanya gejala multikolinearitas, gejala autokorelasi dan gejala heteroskedastisitas. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yaitu tidak terdapat multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika terdapat multikolinearitas maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan taksiran masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. Jika terdapat heteroskedastisitas maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standar error. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan.

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Nugroho (2006: 42), Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan Uji Histogram, Uji Normal P Plot, Uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau Uji Kolmogorov Smirnov. Jika Normalisasi data dilakukan dengan menggunakan Uji Normal P-Plot maka akan menghasilkan gambar distribusi normal dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, apabila data tidak berdistribusi normal maka data tersebut ditransformasi ke dalam bentuk logaritma. Setelah dilakukan transformasi data maka normalitas data dilihat kembali dengan menggunakan metode grafik Normalitas P-Plot dan Uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikan dari variabel penelitian < 0,05 berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya apabila nilai signifikan dari masing-masing variabel > 0,05 maka berarti distribusi data normal. Peneliti akan menggunakan Uji Normal P-Plot.
2. Menurut Nugroho (2006: 51), Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Data yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan Variance Inflation Factor (VIF), korelasi pearson antara variabel-variabel bebas atau dengan melihat eigenvalues dan Condition Index (CI). Jika menggunakan VIF maka nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 sehingga model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Peneliti akan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF).
3. Menurut Nugroho (2006: 59), Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Autokorelasi merupakan korelasi antar data dalam runtun waktu (times series) atau space data (cross section), model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson. Menurut Santoso (2007: 37) Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Korelasi yaitu:
 - a. Jika nilai Durbin Watson berada di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
 - b. Jika nilai Durbin Watson terletak antara -2 sampai 2 maka berarti tidak terjadi autokorelasi.

- c. Jika nilai Durbin Watson berada diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif.
4. Menurut Nugroho (2006: 67), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadi tidaknya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas. Cara memprediksi tidak terdapatnya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot yang menyatakan penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

I. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang akan dibuktikan dalam penelitian, jika terdapat deviasi antara sampel yang ditentukan dengan jumlah populasi maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan antara menolak maupun menerima suatu hipotesis.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian baik secara simultan maupun parsial. Pengujian secara simultan digunakan Uji Statistik F (uji signifikansi simultan) dan pengujian secara parsial digunakan Uji Statistik t (uji signifikansi parsial).

Menurut Ghozali (2007: 64), Uji Hipotesis dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Uji Statistik F
Uji Statistik F ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Uji Statistik t
Uji Statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait.
3. Koefisien Determinasi (R^2)
Koefisien Determinasi (R^2) atau adjusted R^2 bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti jika $R^2 = 0$ menunjukkan tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika R^2 mendekati 0 maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum melakukan pengujian hipotesis melalui pengujian model, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan dalam melakukan pengujian terhadap model regresi berganda.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti.

Statistik deskriptif pada penelitian ini difokuskan kepada:

- a. Nilai minimum, fungsinya untuk menentukan nilai terendah dari variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Sumardi (2008), standar nilai minimum $< 50\%$.
- b. Nilai maximum, fungsinya untuk menentukan nilai tertinggi dari variabel Dana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut Sumardi (2008), standar nilai minimum $> 50\%$.
- c. Nilai rata-rata, fungsinya untuk menentukan jumlah seluruh angka pada data dibagi jumlah data yang ada pada masing-masing variabel.

- d. Nilai standar deviasi, fungsinya untuk mengukur penyimpangan. Jika nilainya kecil maka data yang digunakan mengelompok di sekitar nilai rata-rata.

Statistik deskriptif sebagaimana terdapat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	132	373,190	147,325,150	12,886,872.35	22,557,638.619
PAD	132	2,761,470	1,515,685,947	80,692,656.65	211,855,723.476
KKPD	132	.70	33.85	6.7978	5.23646
Valid N (listwise)	132				

Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa data yang akan digunakan dalam penelitian ini sangat bervariasi dengan perkiraan yang sangat jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal dan merupakan kejadian yang sudah diprediksi sebelumnya sebagaimana lazimnya penelitian di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil olahan data pada Tabel 4.1 diketahui bahwa Nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE) Minimum adalah sebesar Rp. 373,190 artinya Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa proses peningkatan pendapatan suatu daerah sebesar Rp. 373,190 dengan memperhatikan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai DAU Minimum di Sumatera Utara yaitu: Pakpak Bharat. Sedangkan Nilai PE Maximum adalah sebesar Rp. 147,325,150 artinya Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa proses peningkatan pendapatan suatu daerah sebesar Rp. 147,325,150 dengan memperhatikan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai PE Maximum di Sumatera Utara yaitu: Medan. Rata-rata dari PE adalah sebesar Rp. 12,886,872.35 dengan standar deviasi Rp. 22,557,638.619. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota sangat berfluktuasi, rata-rata jarak antara PE Maximum dengan PE Minimum cukup jauh.

Dari hasil olahan data pada Tabel 4.1 diketahui bahwa Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minimum adalah sebesar Rp. 2,761,470 artinya PAD menunjukkan bahwa PAD membiayai pelayanan pembangunan Rp. 2,761,470, terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai PAD Minimum di Sumatera Utara yaitu: Nias Barat. Sedangkan Nilai PAD Maximum adalah sebesar Rp. 1,515,685,947 artinya menunjukkan bahwa PAD suatu daerah semakin baik dalam pembangunannya Rp. 1,515,685,947 dan terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai PAD Maximum di Sumatera Utara yaitu: Medan. Rata-rata dari PAD adalah sebesar Rp. 80,692,656.65 dengan standar deviasi Rp. 211,855,723.476. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sangat berfluktuasi, rata-rata jarak antara PAD Maximum dengan PAD Minimum cukup jauh.

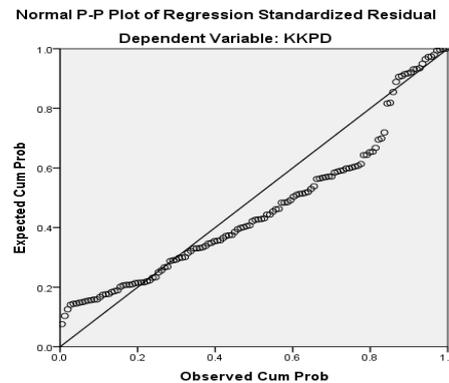
Dari hasil olahan data pada Tabel 4.1 diketahui bahwa Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) Minimum adalah sebesar 0.70 artinya KKPD menunjukkan bahwa tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah 0.70 dan terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai KKPD Minimum di Sumatera Utara yaitu: Deli Serdang. Sedangkan Nilai KKPD Maximum adalah sebesar 33.85 artinya KKPD menunjukkan suatu daerah semakin baik tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah 33.85 dan terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai KKPD Maximum di Sumatera Utara yaitu: Pakpak Bharat. Rata-rata dari KKPD adalah sebesar 6.7978 dengan standar deviasi 5.23646. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat berfluktuasi, rata-rata jarak antara KKPD Maximum dengan KKPD Minimum cukup jauh.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas data dengan normal *Probability Plot* dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Dari grafik normal *Probability Plot* pada gambar 4.1 terlihat bahwa grafik P-P Plot menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang memperlihatkan pola distribusi normal. Untuk meyakinkan bahwa data penelitian ini benar-benar normal, maka akan dilakukan pengujian uji statistik non parametrik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) seperti yang terdapat dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PE	PAD	KKPD
N		132	132	132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	12886872.35	80692656.65	6.7978
	Std. Deviation	22557638.619	211855723.476	5.23646
Most Extreme Differences	Absolute	.290	.382	.147
	Positive	.255	.382	.147
	Negative	-.290	-.356	-.131
Test Statistic		.290	.382	.147
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil Uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua data variabel yang diuji menjadi normal dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat *Tolerance Value and Variance Inflation Factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance kurang dari 0.10 dan VIF lebih besar dari 10, atau jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0.9.

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.651	.464		18.655	.000		
PE	-4.481E-7	.000	-1.930	-8.464	.000	.094	10.613
PAD	4.860E-8	.000	1.966	8.622	.000	.094	10.613

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dan VIF pada variabel PE dan PAD diatas 0.10 dan VIF-nya dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.606 ^a	.368	.358	4.19578	2.087

a. Predictors: (Constant), PAD, PE

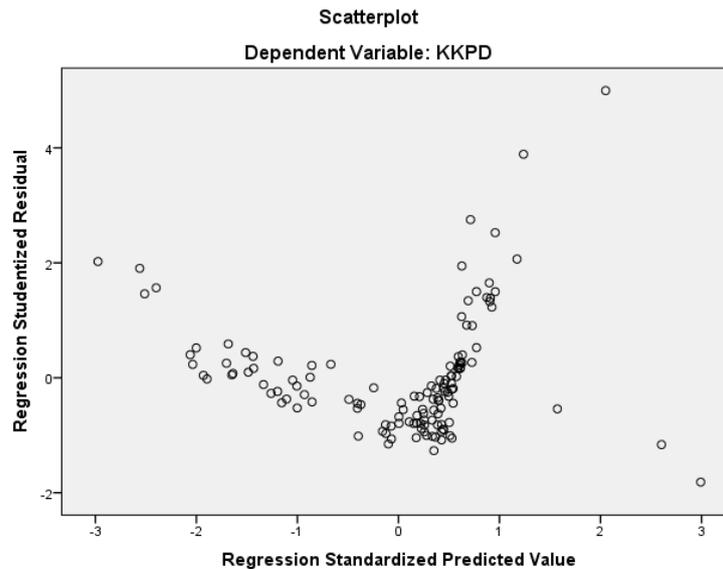
b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson dalam penelitian ini sebesar 2.087. Nilai Durbin Watson tersebut berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana Y adalah nilai residual dan X adalah nilai yang telah diprediksi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatter plot* berikut ini:



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Dari grafik *scatter plot* pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.

3. Hasil Analisis Data

Dari hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil persamaan regresi linier dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Analisis Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.651	.464		18.655	.000
PE	-4.481E-7	.000	-1.930	-8.464	.000
PAD	4.860E-8	.000	1.966	8.622	.000

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Dari tabel 4.5 tersebut, maka model regresi berganda antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut:

$$KKPD = 8.651 + 4.481 PE + 4.860 PAD + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda tersebut, masing-masing dari variabel independen tersebut dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. $a = 8.651$

Nilai konstanta (a) = 8.651, menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) sama dengan nol maka nilai dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 8.651.

b. $b_1 = 4.481$

Koefisien regresi b_1 sebesar 4.481, menunjukkan bahwa setiap kenaikan PE sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 448.1% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol. Ini artinya bahwa antara PE dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) menunjukkan pengaruh artinya setiap

kenaikan PE akan diikuti oleh kenaikan KKPD dan sebaliknya penurunan PE akan mengakibatkan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

c. $b_2 = 4.860$

Koefisien regresi b_2 sebesar 4.860, menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar 486.0% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol. Ini artinya bahwa antara PAD dengan KKPD menunjukkan pengaruh artinya setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh kenaikan KKPD dan sebaliknya penurunan PAD akan mengakibatkan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial.

a. Uji Statistik F

Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1321.102	2	660.551	37.522	.000 ^b
	Residual	2270.985	129	17.605		
	Total	3592.087	131			

a. Dependent Variable: KKPD

b. Predictors: (Constant), PAD, PE

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 37.522 dengan nilai signifikan 0.000. Nilai signifikansinya adalah $0.000 < 0.05$ artinya bahwa variabel independen yaitu DAU dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Uji Statistik t

Uji Statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil Uji Statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.651	.464		18.655	.000
	PE	-4.481E-7	.000	-1.930	-8.464	.000
	PAD	4.860E-8	.000	1.966	8.622	.000

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Dari hasil uji t yang terdapat pada tabel 4.7 dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) bernilai positif pada t hitung sebesar 8.464 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi PE yaitu 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai positif pada t hitung sebesar 8.622 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi PAD yaitu 0.000 lebih kecil dari

0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, untuk meyakinkan atau tingkat kekuatan pengaruh antar variabel dapat dilihat pada tabel koefisien determinasi berikut ini:

**Tabel 4.8 Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.368	.358	4.19578

a. Predictors: (Constant), PAD, PE

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data Diolah)

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.358 yang artinya variabel independen yaitu PE dan PAD dapat menjelaskan variabel dependen yaitu KKPD sebesar 0.358 dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel independen yaitu PE dan PAD dengan variabel dependen KKPD adalah kecil pengaruhnya atau kurang kuat pengaruhnya karena berada dibawah 50%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil uji statistik F yang dilakukan diketahui bahwa nilai F sebesar 37.522 dengan nilai signifikansi 0.000. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PE dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Ini berarti menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. Besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (variabel independen) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (variabel dependen) ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.368 atau 36.8%. Dengan demikian besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 36.8% dan sisanya sebesar 63.2% dijelaskan variabel independen lain diluar model yang terangkum dalam *error*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 20.8%. Walaupun besar pengaruh tersebut sedikit tetapi masih dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara.

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial, diketahui bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai angka signifikansinya sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Variabel PE memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 8.464 artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kemampuan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah, sehingga Dana Alokasi Umum yang dimanfaatkan untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara parsial hasil pengujian statistik mengenai pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel PAD memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 8.622 artinya apabila terjadi kenaikan variabel PAD sebesar 1% akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 8.622 atau 862.2%. Hasil ini mengindikasikan bahwa antara PAD dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan pengaruh secara signifikan artinya setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh

peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan sebaliknya penurunan PAD akan mengakibatkan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten/Kota menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-undang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin baik pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Secara teori pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu: Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan tingkat potensi daerah dan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelayanan pembangunan maka semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar meneliti variabel lain di luar Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Periode pengamatan sebaiknya 10 tahun karena dengan periode pengamatan yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian di daerah lain agar mendapatkan perbandingan dengan daerah Propinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Faisal, 2009, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, Medan: Penerbit PT. Sofmedia.
- Hamid, Edy Suandi, 2005, *Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Landiyanto, Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah*, Surabaya: Cures Working Paper No.05/01.
- L.S., Bambang R., 2008. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Republik Indonesia, 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengolahan Keuangan Daerah*, Jakarta: Nota Keuangan RAPBN 2009.
- Sidabalok, Alimuddin, 2009. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2007-2008*, Medan: Penerbit Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- Sidabalok, Alimuddin, 2009. *Sumatera Utara Dalam Angka 2009*, Medan: Penerbit Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- Sidabalok, Alimuddin, 2011. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 2006-2010*, Medan: Penerbit Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- Sumardi, 2008. *Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peta Kemampuan Keuangan Daerah*, Semarang: Workshop DPRD Kabupaten Nganjuk.
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2008. *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008-2009*, Bandung: Penerbit Fokusmedia.
- www.djpk.depkeu.go.id